

## INSTITUTIONAL BUILDING DALAM PEMBANGUNAN PERTANIAN

Oleh :  
**Hanifah Ihsaniyati\*)**

### Abstract

*Increasing agriculture product by farmers have not been followed yet by increasing farmers income and welfare significantly. Institutional building become important thing for agricultural development that the most actors are small farmer and peasant. The institutions are farmer economic institution and agricultural extension institution. They must can be accessed by farmer to increase their welfare. Therefore there are needed inceasing acess of its institutions by farmers.*

*Key words : institutional building, agricultural development*

### PENDAHULUAN

Indonesia pada dasarnya adalah negara agraris, negara dengan sumberdaya dasar pertanian. Dengan demikian, pembangunan (ekonomi) negara ini seharusnya berkembang atas dasar kemampuan sumberdaya pertaniannya. Dinamika perjalanan sejarah ada pasang dan ada pula surutnya. Ada catatan kisah sukses, akan tetapi masih banyak kerumitan di depan mata dan tidak semakin reda, sejak masalah-masalah infrastruktur, kelembagaan, tataniaga, SDM, ketenagakerjaan, hingga kepada masalah kesiapan memasuki globalisasi dan daya saing.

Akhir-akhir ini muncul lagi wacana melonjaknya harga beras di beberapa daerah di Indonesia. Antisipasi pemerintah pusat atas naiknya harga beras dilakukan dengan menyediakan stok komoditi beras secara nasional dengan melakukan

impor beras dari negara penghasil beras utama di Asia Tenggara. Hal lain yang dilakukan pemerintah untuk menjaga stok produk pertanian lainnya adalah dengan mengimpor gula, buah, dan daging.

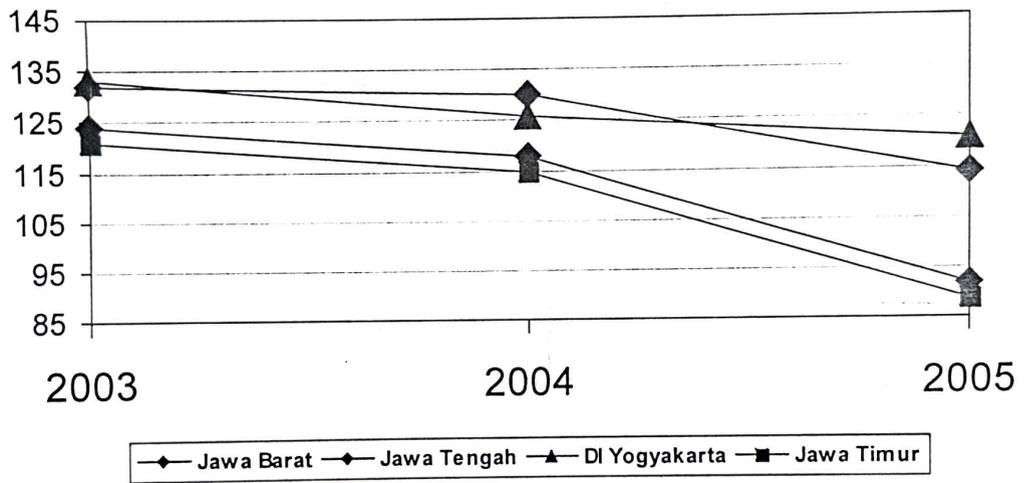
Secara spesifik, saat ini beberapa kondisi sekaligus kendala yang dihadapi petani untuk mengembangkan kegiatan usaha produktifnya, adalah (1) akses yang semakin kurang baik terhadap sumberdaya (*access to resources*), seperti keterbatasan aset lahan, infrastruktur serta sarana dan prasarana penunjang kegiatan produktif lainnya; (2) produktivitas tenaga kerja yang relatif rendah, sebagai akibat keterbatasan investasi, teknologi, ketrampilan, dan pengelolaan sumberdaya yang efisien; (3) perasaan ketidakmerataan dan ketidakadilan akses pelayanan sebagai akibat kurang terperhatikannya rangsangan bagi tumbuhnya lembaga-lembaga sosial (*social capital*) dari bawah; (4)

\*) Dosen Jurusan Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian Fakultas Pertanian UNS

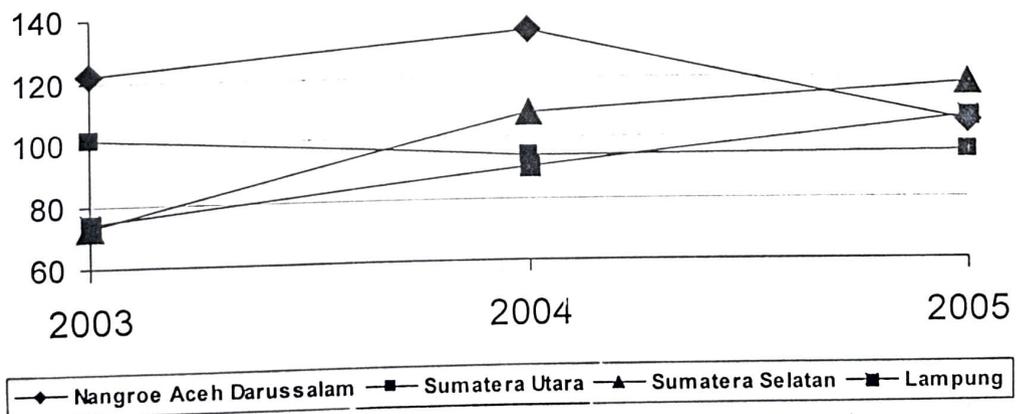
kurangnya rasa percaya diri, akibat kondisi yang dihadapi dalam menciptakan rasa akan keamanan pangan, pasar, harga, dan lingkungan.

Pemerintah pusat dan daerah pada era reformasi sekarang ini kurang melihat pada kepentingan "produsen petani" dalam politik kebijakan perberasan nasional dan komoditi lainnya. Orientasi kebijakan lebih ditekankan pada upaya menjaga tingkat inflasi dan menyediakan kebutuhan beras dan komoditi lain bagi konsumen

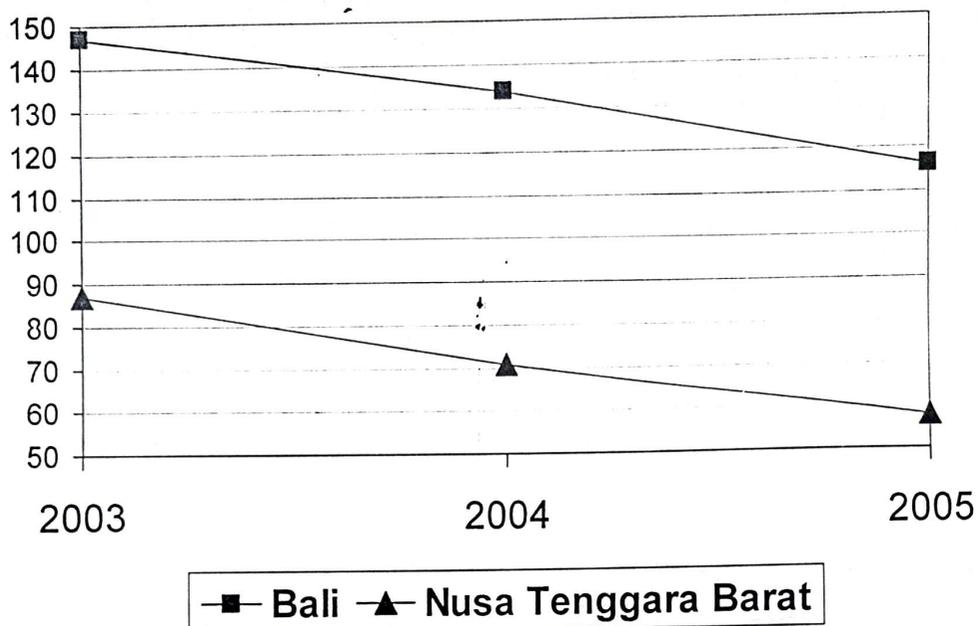
di perkotaan pada tingkat harga yang terjangkau. Pada dunia industri, produsen adalah penentu harga. Tetapi tidak demikian dengan pertanian, petani sebagai produsen tidak mempunyai posisi tawar yang kuat untuk menentukan harga, harga ditentukan oleh pasar yang tidak lain adalah para pedagang besar dan pelaku bisnis industri. Lagi-lagi petani menjadi korban. Berikut kami sampiakan data Nilai Tukar Petani (NTP) :



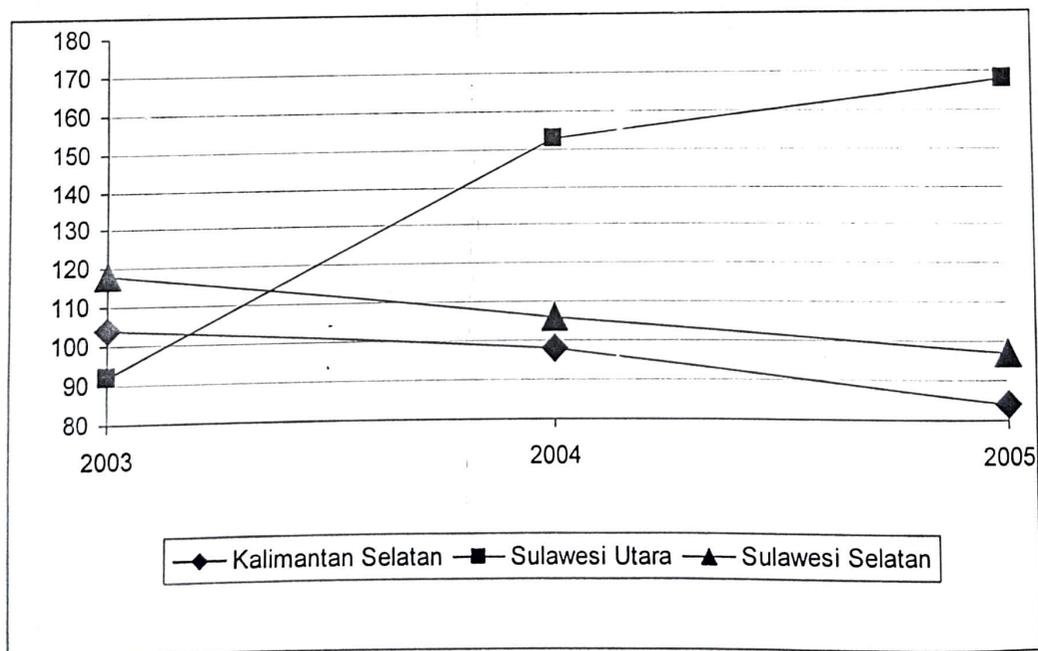
Gambar 1. Nilai Tukar Petani di Pulau Jawa (1993=100)



Gambar 2. Nilai Tukar Petani di Pulau Sumatera (1993=100)



Gambar 3. Nilai Tukar Petani di Bali dan Nusa Tenggara Barat (1993=100)



Gambar 4. Nilai Tukar Petani di Pulau Kalimantan dan Sulawesi (1993=100)

### Pentingnya *Institutional Building*

Pembangunan pertanian dan pedesaan masa mendatang harus merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan petani di pedesaan, yang sekaligus mendorong terwujudnya pengembangan ekonomi pedesaan melalui kegiatan-kegiatan produktif dan berdaya saing. Masalah kritis saat ini adalah bahwa meningkatnya produksi pertanian selama ini belum disertai dengan meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan petani secara signifikan. Petani sebagai unit pertanian terkecil belum mampu meraih nilai tambah yang rasional sesuai skala usaha tani terpadu (*integrated farming system*).

Oleh karena itu persoalan membangun kelembagaan (*institution*) di bidang pertanian dalam pengertian yang luas menjadi semakin penting, agar petani mampu melaksanakan kegiatan yang tidak hanya menyangkut *on farm* saja, tetapi juga terkait erat dengan aspek-aspek *off farm*. Dibutuhkan komitmen pemimpin dalam merekonstruksi dan merestrukturisasikan pembangunan pertanian mendatang, sehingga petani dan masyarakat pedesaan lebih bermartabat dan sejahtera.

*Institutional building* sebagai prasyarat keharusan dalam pembangunan pertanian yang bagian terbesar pelakunya petani “kecil dan gurem” sebagai contohnya adalah lembaga ekonomi petani dan lembaga penyuluhan pertanian yang dapat diakses petani. Secara substansial, upaya kelembagaan tersebut pada dasarnya dapat dipandang sebagai langkah menuju rekonstruksi ulang dalam penguasaan dan akses

sumberdaya produktif di bidang pertanian.

Sebagai nilai dalam pembangunan pertanian dan pedesaan ke depan, seyogyanya upaya kelembagaan tersebut diharapkan menjadi pendorong terciptanya *the same level playing field* petani dan pelaku ekonomi lainnya, berdasarkan “aturan main” yang *fair*, transparan, demokratis dan adil. Upaya kelembagaan tersebut harus mampu mendorong peningkatan basis sumberdaya, produktivitas, efisiensi dan kelestarian bagi kegiatan-kegiatan produktif pertanian, yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.

Sebagai contoh adalah koperasi, lembaga ini sebagai bangun kelembagaan ekonomi petani yang pada dasarnya merupakan salah satu *social capital* untuk melawan ketidakadilan, yang diharapkan menjadi salah satu pemicu bagi pemberdayaan ekonomi petani di desa. Pada intinya, prinsip koperasi adalah memposisikan anggota sebagai pemilik dan pengguna jasanya, dan termanifestasikan dalam skema pemilik-pengguna jasa, yang sangat sesuai untuk pengelolaan bidang pertanian dan pedesaan.

Berbagai kelemahan yang selama ini dipersepsikan masyarakat (petani) terhadap koperasi harus menjadi prioritas dalam “mengembangkan kembali” jiwa kelembagaan ekonomi ini, karena memang koperasi bukanlah “sapu jagat”. Di lain pihak, berbagai moral berbahaya (*hazard*) yang selama ini menjadi “penyakit” koperasi harus diantisipasi dalam masa depan.

Kelembagaan petani yang ada sekarang hampir semuanya memiliki ketergantungan yang kuat dengan program dan proyek pemerintah. Jarang

sekali ditemui suatu kelembagaan pertanian yang secara mandiri tanpa campur tangan dan bantuan pemerintah. Hal ini seharusnya menjadi perhatian serius pemerintahan yang baru dan diambil langkah-langkah pembaharuan agar kelembagaan petani bisa tumbuh dengan lebih mandiri dan dinamis, serta tidak terlalu menggantungkan diri pada bantuan pemerintah.

Restruktuisasi kelembagaan petani harus didasarkan pada kepentingan petani sebagai bagian dari rantai suplai (*supply chain*) produk pertanian, dan bukan lagi didasarkan pada kepentingan nasional (makro). Sebagai pelaku yang menjadi bagian dari *agri-supply chain*, petani membutuhkan keterkaitan dengan pelaku pasar lainnya. Pembentukan kelembagaan petani haruslah dalam konteks mengaitkan petani pada sistem *agri-supply chain* yang ada. Ketidakmampuan petani untuk beradaptasi dan terkait dengan *supply chain* pasar modern, akan menyebabkan masuknya produk pertanian dan malah mungkin produsen/petani dari luar negeri.

Rekonstruksi kelembagaan petani yang terpenting adalah membantu (memberdayakan) dan memperkokoh ikatan mereka dalam suatu kelembagaan yang inovatif yang menunjang *agri-supply chain* dengan kompetensi tertentu, sehingga terbentuk suatu rantai yang bernilai, yang jelas ditunjang oleh kompetensi yang kuat dari masing-masing pelaku. Dalam kaitan ini, dukungan penguatan keuangan (pembiayaan) dan non keuangan merupakan aspek penting.

Salah satu aspek penting yang senantiasa terabaikan adalah pemberdayaan petani dalam rangka pemenuhan pembiayaan atau permodalan usaha. Mendorong

kemampuan petani dalam penyelenggaraan usaha permodalan (perkreditan) pada masa mendatang menjadi semakin penting. Pengembangan koperasi perkreditan pertanian perlu pemikiran lebih mendalam dari pengambil kebijakan.

Model kelembagaan untuk merestrukturisasikan pertanian dan pedesaan tidak sebatas pada koperasi. Keunikan dan keragaman wilayah dan budaya pada dasarnya merupakan potensi yang harus berkembang, sesuai dengan kebhinekaan Indonesia. Model-model sederhana seperti kelompok usaha pertanian hingga ke koperasi petani dapat menjadi cara untuk memperkuat posisi tawar (*bargaining position*) petani.

Kelembagaan yang perlu dibangun yang tidak kalah pentingnya adalah lembaga penyuluhan, karena lembaga ini adalah lembaga yang seharusnya mendampingi dan memberdayakan petani secara langsung. Kurangnya akses petani terhadap IPTEK, pembiayaan/permodalan, dan informasi pasar dapat didampingi oleh penyuluh dan lembaga penyuluhan pertanian yang terkoordinatif.

Penyuluhan pertanian adalah lembaga yang berfungsi membantu masyarakat, khususnya masyarakat pertanian untuk secara mandiri mampu membangun usahatani (agrobisnis) yang berposisi tangguh, berteknologi maju, serta berkelanjutan dan akrab lingkungan.

Meskipun yang membangun usahatani agrobisnis itu petani sebagai subjek yang mandiri, akan tetapi pertanian yang tangguh, maju, efisien, dan akrab lingkungan itu tidak mungkin terwujud apabila tidak ada pihak luar petani yang menopang, menggandeng, melayani, memanfaatkan, dan

memberdayakannya. Petani membutuhkan topangan IPTEK baru, pelayanan permodalan, sarana dan jasa, menggandeng kemitraan usaha, permintaan konsumen serta iklim yang kondusif untuk memicu, memacu dan mengalirkan energi yang dimilikinya. Peran-peran tersebut dapat difasilitasi oleh penyuluh pertanian yang profesional sehingga mampu menggali potensi dirinya dan berani bertindak untuk memperbaiki kualitas keidupan, antara lain dengan cara pendidikan untuk kesadaran dan kemampuan diri mereka.

Untuk itu, upaya meningkatkan serta membangun penyuluhan pertanian, yang profesional saat ini sangat penting dan tidak bisa ditawar-tawar lagi, apabila kita berkeinginan memberdayakan masyarakat pertanian Indonesia agar tetap *survive* dalam menghadapi persaingan global. Begitu pentingnya peran penyuluhan pertanian bagi peningkatan kesejahteraan petani dan pembangunan pertanian membutuhkan pematapan kelembagaan penyuluhan yang terkoordinatif dengan baik. Oleh karena itu, penataan ulang kembali kelembagaan penyuluhan pertanian perlu dilakukan agar masyarakat pertanian khususnya petani dapat dengan mudah mengakses penyuluhan dan informasi pertanian.

### Strategi komunikasi

Berikut ini ada beberapa hal yang merupakan strategi komunikasi yang dapat dilakukan oleh komunikator pembangunan pertanian sesuai fakta yang ada, antara lain :

1) Dibuka akses petani terhadap sumber-sumber pembiayaan (bank dan non-Bank) dengan

menempatkan lembaga ekonomi petani baik koperasi, bank maupun non bank di tingkat desa atau kecamatan. Meletakkan lembaga ekonomi petani tersebut pada tempat yang terjangkau oleh petani.

- 2) Dilaksanakannya pemberdayaan masyarakat agar petani mampu mengakses permodalan dan pembiayaan dengan membangun lembaga ekonomi kerakyatan petani berbasis potensi daerah sebagai social capital yang akan melibatkan petani pada sistem rantai suplai pertanian.
- 3) Dibuka akses petani terhadap informasi pertanian dengan meningkatkan akses petani terhadap penyuluh dan lembaga penyuluhan di tingkat desa, misal dengan memfungsikan pos penyuluhan.
- 4) Untuk mendukung akses petani terhadap IPTEK dan penyuluhan, perlu ditempatkannya penyuluh, ahli teknologi informasi, dan dokter hewan di tiap desa.
- 5) Dilaksanakannya penyuluhan atau pemberdayaan petani yang tidak terbatas pada peningkatan pendapatan tetapi juga peningkatan daya saing politik untuk mewujudkan dan mengawal pelaksanaan kebijakan yang berpihak kepada petani.
- 6) Digabungkannya lembaga-lembaga penyuluhan dalam bidang pertanian secara luas seperti lembaga penyuluhan tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perikanan, perkebunan dan lain-lain sehingga tercipta lembaga penyuluhan yang terkoordinatif.
- 7) Difungsikannya lembaga penyuluhan pemerintah, swasta, dan swadaya petani.

- 8) Difungsikannya Pos Penyuluhan, Balai Penyuluhan Pertanian, Badan Pelaksana Penyuluhan di tingkat Kabupaten, Badan Koordinasi Penyuluhan tingkat propinsi, dan Badan Penyuluhan tingkat Pusat.
- 9) Mengaktifkan kelompok tani dan gabungan kelompok tani untuk menguatkan kebersamaan dan posisi tawar petani.
- 10) Menempatkan satu Penyuluh Pertanian Lapang (PPL) untuk satu desa sehingga diharapkan akses petani terhadap informasi dan penyuluhan menjad tinggi.
- 11) Penyuluhan pertanian/pemberdayaan petani dengan metode partisipatif untuk mengurangi ketergantungan petani.
- 12) Pengembangan jejaring kerja antar pelaku penyuluhan pertanian dalam arti luas; seperti pertanian, kehutanan, perkebunan, peternakan dan perikanan, tanaman pangan dan hortikultura.

### Kesimpulan

*Institutional building* baik itu lembaga penyuluhan, lembaga ekonomi petani dari kelompok usaha petani sampai koperasi sangat perlu dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Selanjutnya, petani yang tergabung dalam sebuah kelembagaan ekonomi petani secara mandiri mampu bersaing dengan pelaku pertanian yang lain (mis :pelaku bisnis) sehingga mampu menaikkan posisi tawarnya. Selain itu, petani harus didukung oleh lembaga penyuluhan yang akan

mendampingi dan menjadi sumber informasi IPTEK, pasar dan kebijakan/politik pertanian. Dengan membangun kelembagaan pertanian baik di tingkat petani (mis : kelompok tani, kelompok usaha, lembaga ekonomi petani, koperasi) maupun lembaga penyuluhan, maka kemampuan manajemen usahatani petani meningkat sehingga pendapatan petani meningkat selanjutnya kesejahteraan petani pun meningkat.

### Sumber bacaan

Hamengkubuwono X.2006. *Makalah tentang Kebangkitan Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan :Realita dan Harapan dalam Seminar Nasional di UGM Yogyakarta.*

Departemen Pertanian. 2006. *Statistik Pertanian.* Jakarta

Winoto joyo dan Hermanto Siregar. 2007. *Makalah tentang Dinamika Penggunaan Lahan Pertanian dan Kaitannya dengan Kesejahteraan Petani dan Global Warming :Peran Ilmu Ekonomi Pertanian dalam KOPERNAS PERHEPI 2007 di Surakarta.*

Wibowo, R.2007.Makalah tentang : *Dinamika Pemikiran PERHEPI dalam Tiga Tahun Terakhir dalam KOPERNAS PERHEPI 2007 di Surakarta.*